

**ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA BERDASARKAN PSAK
107 DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) HUDATAMA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Disusun Oleh:

ZUANITA ADRIYANI

1605015055

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP : 19690830 199403 2 003

Jl. Tugu Lapangan no H40, Tambakaji RT 08 RW 01, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Zuanita Adriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Zuanita Adriyani

NIM : 1605015055

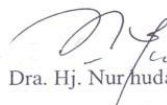
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir (TA) : **"Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang"**.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir (TA) saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya capkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2019



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan Semarang. Telp : (024) 7608454.

Website: febi_walisongo.ac.id, Email: febiwalisongo@gmail.com.

PENGESAHAN

Nama : Zuanita Adriyani
NIM : 1605015055
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

25 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
Program Diploma Tiga (D3) dan syarat memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik
2018/2019.

Ketua Sidang,

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 195709131982031002

Penguji Utama I,

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si
NIP. 197905122005012004

Semarang, 25 Juli 2019

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji Utama II,

Heny Yuningrum, S.E., M.Si, NN
NIP. 198106092007102005



Pembimbing,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

MOTTO

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 282)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan salah satunya nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang saya sayangi:

1. Mama dan adik saya, Syakilah dan Ahmad Bani Adam yang selalu mendukung dan mendo'akan saya. Terutama mama yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Dan seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.
2. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu ada disaat senang maupun susah. Yang selalu mendukung dari kejauhan.
3. Teman seperjuangan, kelas D3 PBS-B yang sudah menghabiskan Tiga tahun bersama-sama di UIN Walisongo tercinta.
4. UIN Walisongo tercinta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu disini, dan tidak lupa seluruh dosen FEBI yang saya sayangi.

Semarang. 20 Juni 2019

Zuanita Adriyani

1605015055

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2019



Deklarator,

Zuanita Adriyani

1605015055

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa serta mengetahui kesesuaiannya dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ijarah multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan KSPPS Hudatama, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Hudatama kepada anggota dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, wawancara kepada karyawan KSPPS Hudatama, dokumentasi serta penelusuran data online terkait dengan penelitian yang dilakukan di KSPPS Hudatama ini.

Hasil dari analisis data pembiayaan ijarah multijasa yang dilakukan di KSPPS Hudatama dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama belum terlaksana sepenuhnya. Karena dari lima poin pembahasan yaitu biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan serta perpindahan kepemilikan hanya 60% yang dapat diterapkan, sedangkan 40% lainnya belum diterapkan karena tidak sesuai dengan pembiayaan ijarah multijasa yang tanpa aset berwujud.

Kata Kunci: Ijarah Multijasa dan PSAK 107

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) yang berjudul: **“Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”**. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III (D3) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.M, selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Bapak Nurudin, S.E., M.M dan Ibu Sokhikhatul Mawadah , M.E.I yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan saran

6. Ibu Amelia Nuralata, ST, M.M selaku Kepala Bidang SDM KSPPS Hudatama yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lembaga tersebut.
7. Bapak Robi Aryanto, S.E selaku Manager Pemasaran KSPPS Hudatama yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Seluruh karyawan KSPPS Hudatama yang telah membantu dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
9. Orangtua dan adik saya yang saya sayangi selalu dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, mendo'akan dan memotivasi selama menyusun Tugas Akhir ini.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
11. Teman seperjuangan kelas D3 PBS-B yang telah berjuang bersama selama tiga tahun terakhir.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu panulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai informasi yang berguna bagi pembaca.

Semarang, 20 Juni 2019

Zuanita Adriyani
1605015055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	13
B. Ijarah dan Ijarah Multijasa	15
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah	23
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HUDATAMA ...	27
A. Sejarah dan Visi Misi KSPPS Hudatama.....	27

	B. Nilai Dasar, Tujuan serta Budaya Perusahaan	
	KSPPS Hudatama	28
	C. Legalitas Perusahaan, Wilayah Kerja dan Struktur	
	Organisasi KSPPS Hudatama	29
	D. Produk-produk KSPPS Hudatama	32
	E. Layanan KSPPS Hudatama.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	A. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan di	
	KSPPS Hudatama	40
	B. Penerapan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi	
	Ijarah berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama.....	49
BAB V	PENUTUP.....	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1992 yang ditandai berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak saat itulah perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah baru yang didirikan seperti koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bahkan bank konvensionalpun mengembangkan diri melalui unit usaha syariah seperti Bank Jateng Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro yang unik dan spesifik khas Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial (baitul maal).² Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga bisnis (tamwil), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

¹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, h. 34

² <http://eprints.walisongo.ac.id/7195/3> diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 11.04 WIB

Syariah (KSPPS) memberikan layanan yang diberikan lembaga keuangan pada umumnya yaitu penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat yang *surplus* dan menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat yang *defisit*. Sedangkan sebagai lembaga sosial (baitul maal), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Selain itu juga memberikan layanan sosial baik di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan kemakmuran masyarakat.

Secara yuridis koperasi syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UUD 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi, yaitu Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM). Lebih detailnya diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004)³

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang memberikan pelayanan produk yang dibutuhkan masyarakat modern seperti sekarang ini. Dimana produk tersebut di desain sesuai dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, seperti berbagai macam produk penghimpun dana dengan berbagai macam jenisnya. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk membedakan antara satu produk penghimpunan dengan produk lainnya. Selain produk penghimpun dana, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama juga menyediakan produk penyaluran dana yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*) baik untuk kegiatan usaha maupun keperluan lainnya.

³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, h. 60-61

Produk ijarah multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama yang menjadi andalan para anggota saat mengajukan pembiayaan. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah anggota yang melakukan pembiayaan menggunakan produk ijarah multijasa yaitu sebanyak 1.043 anggota per April 2019.⁴ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.⁵

Sebagai lembaga keuangan, pencatatan setiap transaksi yang terjadi atau laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Laporan keuangan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.⁶ Tujuan lain laporan keuangan adalah untuk membuat keputusan ekonomi yaitu dengan menilai dari laporan keuangan yang telah dibuat.

Standar akuntansi yang digunakan untuk ijarah multijasa adalah PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang disahkan pada tahun 2007 dan mengalami penyesuaian pada tanggal 6 Januari 2016 tentang definisi nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.⁷

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Robi Aryanto, S.E selaku Manager Pemasaran KSPPS Hudatama pada tanggal 17 Juni 2019

⁵ Ajeng Mar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 6 No. 1, Juni 2014, hal. 109-110

⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi ...* h. 75

⁷ iaiglobal.or.id diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 08.44 WIB

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah (2015) menunjukkan hasil bahwa PT. BPRS Lantabur Tebuireng telah menerapkan akuntansi ijarah sesuai dengan PSAK 107 sebagai pedoman pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan prosentase 87,5%. Namun perlakuan akuntansi ijarah tidak dapat digunakan sepenuhnya karena terdapat perbedaan karakteristik antara pembiayaan ijarah dengan pembiayaan multijasa.⁸ Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Cut Vhintara dan Rahmawaty (2017) menunjukkan hasil bahwa penerapan PSAK 107 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah belum sesuai sepenuhnya, hal ini dikarenakan dari segi pengakuan beban perbaikan aset ijarah harusnya menjadi tanggungjawab pemilik, namun pada praktiknya PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak melakukan pencatatan terhadap biaya perbaikan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan PSAK 107. Serta PT. BPRS Hikmah Wakilah belum mengungkapkan transaksi ijarah dalam laporan keuangan dan belum memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).⁹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / magang, ternyata ada perbedaan konsep pembuatan jurnal umum yang dilakukan KSPPS Hudatama Cabang Mangkang dan Cabang Sambiroto. Perbedaan itulah yang menjadikan penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang standar akuntansi yang diterapkan di KSPPS Hudatama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang dengan judul **“Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”**

⁸ Oktaviani Mariyanti, Nur Anisah, *Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2015, h. 168

⁹ Cut Vhintara, Rahmawaty, *Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh*, Vol. 2 No. 4, h. 159-160

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran pembiayaan dengan akad ijarah multijasa yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ijarah multijasa pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 107 pada pembiayaan dengan akad ijarah multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang akad ijarah multijasa dan analisis ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107.

2. Bagi Akademisi

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswa kedalam aplikasi yang sesungguhnya pada dunia kerja.
- b. Evaluasi dan perbaikan materi kuliah agar sesuai dengan realita yang ada di dunia kerja.

3. Bagi Pembaca

- a. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang akad ijarah multijasa dan PSAK 107 yang diterapkan pada salah satu lembaga keuangan syariah.

- b. Sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

4. Bagi Praktisi dan Instansi

Sebagai bahan evaluasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang berdasarkan hasil penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Farid Muchlasin Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017, dengan judul:¹⁰ “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)*” dengan kesimpulan bahwa pembiayaan dengan prinsip ijarah multijasa di BMT Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa).

Perbedaannya dengan penelitian ini dari segi tempat penelitian masih Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sedangkan penelitian yang saya tulis sudah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS). Selain itu di BMT Tumang Cabng Kartasura tempat dimana saudara Farid Muchlasin melakukan penelitian, terdapat akad ijarah murni dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yang tidak ada di KSPPS Hudatama tempat saya melakukan penelitian.

¹⁰ Farid Muchlasin, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)”, *Skripsi dipublikasikan* pada eprints.iain-surakarta.ac.id/1621 diakses tanggal 23 April 2019 pukul 11.53 WIB

2. Skripsi yang disusun oleh Dian Gunawan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, yang berjudul:¹¹ “*Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar*” dengan kesimpulan bahwa dalam transaksi ijarah, hal yang ditekankan atau menjadi objek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa serta dalam perlakuan akuntansi, PT. BNI Syariah Cabang Makassar mengacu pada PSAK Nomor 101, PSAK Nomor 107, maupun *International Accounting Standards*. PT. BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK Nomor 107 (2008) tentang akuntansi ijarah dalam mencatat transaksi ijarah dan menyajikannya dalam laporan keuangan.

Perbedaan dengan penelitian yang saya tulis adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Dian Gunawan dilakukan di lembaga keuangan syariah perbankan bukan koperasi, penerapan PSAK 107 yang dilakukan peneliti untuk akad ijarah murni dan pada BNI Syariah Cabang Makassar terdapat akad ijarah murni dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), laporan keuangan yang menjadi penelitian bukan pengakuan dan pengukuran, serta lebih banyak menjelaskan tentang PSAK 101.

3. Skripsi yang disusun oleh Akhir Saleh Pulungan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul:¹² “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah dalam Rahn berdasarkan PSAK No. 107 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan)*” dengan kesimpulan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan di unit pegadaian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan

¹¹ Dian Gunawan, “Penerapan PSAK 107 atas Transaksi *Ijarah* pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar”, *Skripsi dipublikasikan* pada repository.unhas.ac.id/6257 diakses tanggal 23 April 2019 pukul 12.15 WIB

¹² Akhir Saleh Pulungan, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah dalam Rahn berdasarkan PSAK No. 107 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan)”, *Skripsi dipublikasikan* pada etheses.uin-malang.ac.id/5964, diakses tanggal 23 April 2019 pada 12.01 WIB

dihitung per 15 hari dalam batas waktu maksimal 120 hari atau 4 bulan. Penentuan ini sudah sesuai dengan ED PSAK 107, bank tidak melakukan pencatatan atas barang jaminan nasabah, yang mana dapat membahayakan suatu barang mudah hilang dan tidak memiliki keterangan yang jelas, dalam penentuan tarif biaya ijarah pihak Unit Pegadaian menghitung sesuai dengan taksiran barang, serta perlakuan akuntansi dalam pembiayaan ijarah di Unit Pegadaian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Sidempuan terkait pengakuan, pengukuran, pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah tempat penelitian merupakan lembaga keuangan syariah bank dan bukan koperasi, produk yang menjadi penelitian bukan ijarah multijasa melainkan ijarah yang diterapkan dalam akad rahn, hasil penelitian lebih menjelaskan ke rahn.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.¹³ Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 15

menyediakan bukti presentasi.¹⁴ Adapun lembaga keuangan syariah yang menjadi tempat melakukan penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden.¹⁵ Dengan data tersebut, peneliti memperoleh informasi langsung dari karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan mudah dan cepat karena sudah tersedia.¹⁶ Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari internet atau website resmi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun obeservasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, h. 3

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian ...* h. 129

¹⁶ *Ibid*, h. 123

faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam observasi ini peneliti berperan sebagai observasi non-partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.¹⁷ Peneliti hanya melihat atau mendengarkan tanpa partisipan aktif. Hanya mengamati aktivitas yang dilakukan.

b. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang-kadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan atau mendukung wawancara dan observasi berpartisipatif.¹⁹ Pengumpulan data secara dokumentasi ini yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan akad ijarah dan PSAK 107 yang ada di KSPPS Hudatama.

d. Penelusuran Data Online

Semakin canggihnya teknologi yang ada, maka semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tidak terkecuali bagi para akademisi yang sedang membutuhkan referensi dan informasi untuk penelitiannya. Dalam metode penelusuran online ini, peneliti mencari sumber dan tinjauan pustaka yang diunggah di website.

¹⁷ Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Metodologi ...* h. 38

¹⁸ *Ibid*, h. 50

¹⁹ *Ibid*, h. 75

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk menyajikannya kepada orang lain.²⁰ Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik secara observasi, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan selama melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisannya, maka penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibagi menjadi pengertian KSPPS serta peran dan fungsi koperasi syariah, ijarah dan ijarah multijasa dibagi menjadi pengertian ijarah, jenis-jenis ijarah, rukun dan ketentuan syariah ijarah, berakhirnya akad ijarah, pengertian ijarah multijasa, dasar hukum ijarah multijasa, Serta PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.

²⁰ *Ibid*, h. 85

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HUDATAMA

Berisi tentang sejarah dan visi misi KSPPS Hudatama Semarang, nilai dasar, tujuan serta budaya kerja KSPPS Hudatama Semarang, legalitas perusahaan, wilayah kerja dan struktur organisasi KSPPS Hudatama Semarang, produk-produk KSPPS Hudatama Semarang serta layanan KSPPS Hudatama Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa dan penerapan pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah di KSPPS Hudatama berdasarkan PSAK 107

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Secara etimologis, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*Coopere*” dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata “*Cooperation*”. Kata “*Co*” memiliki arti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja. Maka, kata “*Cooperation*” dapat berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Untuk hal ini, kerjasama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

²¹ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, Yogyakarta: expert, 2017, h. 33

²² *Ibid*,

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.²³

2. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan memiliki peran ganda yakni sebagai lembaga bisnis dan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga bisnis, peran koperasi syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan yakni sebagai penghimpun dana, penyaluran dana, dan penyedia jasa keuangan. Namun berbeda dengan perbankan pada umumnya, baik penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang dilakukan haruslah sektor ekonomi yang halal dan sesuai aturan Islam.

Sedangkan sebagai lembaga sosial, koperasi syariah memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karenanya koperasi syariah harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber-sumber dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).²⁴

Dalam rangka mencapai tujuannya, fungsi koperasi syariah antara lain:²⁵

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional.

²³ Farid Hidayat, *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, Vol. 2 No. 1, Desember 2016, h. 384-385

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 126

²⁵ *Ibid*, h. 131

- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

B. Ijarah dan Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Ijarah dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindah hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindah hak kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).²⁷

Dari pengertian diatas, ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya,

²⁶ Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013, h.38

²⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 226

karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang.²⁸

2. Jenis-jenis Ijarah

Jenis-jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- a. Ijarah manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
- b. Ijarah manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

Adapun berdasarkan *Exposure Draft PSAK 107*, ijarah dibedakan menjadi:³⁰

- a. Ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
- b. *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT) merupakan ijarah dengan *wa'ad* (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas aset yang dialihkan telah diselesaikan dan aset ijarah telah diserahkan kembali pada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad ijarah sebelumnya.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *ibid*, h. 228

³⁰ *ibid*,

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:

1. Hibah
2. Penjualan, dimana harga harus disepakati kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan:
 - a) Sebelum akad berakhir
 - b) Setelah akad berakhir
 - c) Penjualan secara bertahap sesuai dengan *wa'ad* (janji) pemberi sewa. Untuk perpindahan secara bertahap, harus ditentukan bagian penyewa setiap ia melakukan harga pembayaran dari harga total sampai ia memiliki aset tersebut secara penuh di akhir kontrak. Sistem ini mengharuskan pembuatan kontrak untuk setiap bagian penjualan, sampai bagian terakhir dijual kepada penyewa. Jika kontrak ijarah batal karena alasan-alasan yang mendasar sebelum perpindahan kepemilikan secara penuh kepada penyewa, aset yang disewanya menjadi milik bersama penyewa dan pemberi sewa secara proporsional.
3. Jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*) atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi apabila seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut.

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah yang muncul karena ia menjadi penyewa.

Secara global, ijarah dibagi atau dikembangkan menjadi:³¹

- a. Ijarah *Mutlaqah* atau *Leasing*, adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum muslim membagi lagi menjadi ijarah *mutlaqah* dengan menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu dan menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu.
 - b. *Bai at-Takjiri* atau *Hire Purchase*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebahagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
3. Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah³²
- Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu
- a. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa/ *lessor /mu'jir* dan penyewa/ pengguna jasa/ *lessee/ musta'jir*.
 - b. Obyek akad adalah berupa: manfaat aset/ *ma'jur* dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
 - c. Ijab kabul/ serah terima.

Ketentuan syariah:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*
- b) Obyek akad ijarah
 1. Manfaat aset/ jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer tersebut harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya
 - b. Harus bersifat yang dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan); maka ijarah atas obyek sewa yang melanggar

³¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2008, h. 34

³² Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi ...*, h. 230

perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh dan menyewakan rumah untuk berjudi.

- c. Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya adalah kewajiban sholat, puasa tidak dapat dialihkan karena merupakan kewajiban setiap individu, mempekerjakan seseorang untuk membaca Al-Qur'an dan pahalanya (manfaat) ditujukan untuk orang tertentu, karena pahala kebaikan akan kembali pada yang membacanya sehingga tidak ada manfaat yang dialihkan, barang yang habis konsumsi, karena mengambil manfaatnya sama saja dengan memilikinya.
- d. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa.
- e. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

2. Sewa dan upah

Yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

- a. Harus dijelaskan besarannya dan diketahui oleh pihak yang berakad. Misalnya Toko ABC merekrut karyawannya yang ditugaskan sebagai pramuniaga (pekerja dan pemberi kerja) dan gaji yang disepakati adalah dua juta per bulan. Tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan perusahaan karena besarannya menjadi tidak pasti.
- b. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan obyek akad.
- c. Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda ukuran dan waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda. Misalnya sewa atas mobil yang jenisnya sama misalnya Innova 2006, di

Jakarta sewa per hari Rp. 500.000,- sedangkan di Yogyakarta Rp. 400.000,-.

3. Ketentuan syariah untuk *ijarah muntahiya bit tamlik*

- a. Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Adapun perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun pemberian hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarah* berakhir.
- b. Janji kepemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'ad*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad *ijarah*.
- c) Ijab kabul
Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak yang dilakukan.

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b. Periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
- c. Terjadi kerusakan aset.
- d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Jika ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka apabila sang bayi atau yang menyusui meninggal akadnya akan batal.

5. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah atas jasa atau dikenal dengan ijarah multijasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud. Ijarah multijasa ini muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia bermutasi menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani semua jasa.³³

Menurut Nasution (2009), pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan ini, bank syariah mendapat imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.³⁴

Secara umum timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah. Dengan demikian secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).³⁵

³³ kim.ung.ac.id/15459, diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 18.45 WIB

³⁴ Oktaviani Mariyanti, Nur Anisah, *Perlakuan ...*, h. 158

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 223-224

6. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

1. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْاعِلُوهُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.s Al Baqarah: 233)

2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004³⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, dasar hukum pembiayaan ijarah multijasa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*ja'iz*) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga, h. 260

- c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi Ijarah

Nurhayati dan Wasilah (2013: 2) menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.³⁷

Standar akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah adalah PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Isinya:³⁸

1. Pendahuluan

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

³⁷ Oktaviani Mariyanti, Nur Anisah, *Perlakuan ...*, h. 159

³⁸ *Ibid*, h. 160-161

Definisi

Beberapa penjelasan yang ada dalam PSAK 107 antara lain:

“Asset ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan”

“Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksudkan adalah sewa operasi (*operating lease*)”

“*Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah ijarah dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu”

“Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar”

“Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud”

“Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset”

“Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset”

“*Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu”

2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (*mu'jir*)

a. Biaya perolehan

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

b. Penyusutan dan amortisasi

Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

c. Pendapatan dan beban

- 1) Pendapat sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
- 2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- 3) Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah
 - a) Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya
 - b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya

d. Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dengan cara:

- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.
- 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 4) Penjualan secara bertahap.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Sedangkan dalam pengungkapan pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah muntahiya bittamlik*.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) HUDATAMA

A. Sejarah dan Visi Misi KSPPS Hudatama

1. Sejarah KSPPS Hudatama

KSPPS Hudatama didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 atas inisiatif remaja dan takmir Masjid Al Huda yang pada awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola unit simpan pinjam pola syariah dan waserda (warung serba ada). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2005 KSPPS Hudatama memilih untuk fokus ke unit simpan pinjam syariah karena dapat lebih banyak membantu pemberdayaan umat dan pada tahun 2012 KSPPS Hudatama melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hudatama dengan tingkat cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi baru pada tahun 2016 ini, maka dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS Hudatama memberikan layanan keuangan dengan prinsip syariah, yaitu simpanan dan pembiayaan (baitul tamwil) serta pengelolaan dana sosial (baitul maal). Dan pada tahun 2012 kami memperluas wilayah kerja menjadi tingkat provinsi. Sampai dengan tahun 2015 kami sudah memiliki 5 kantor cabang tamwil dan 1 kantor maal untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dan sekitarnya.

2. Visi dan Misi KSPPS Hudatama

Visi:

Membanggakan dan Menyejahterakan Umat

Misi:

- a. Melayani dengan amanah dan profesional
- b. Melaksanakan tata kelola koperasi syariah yang sehat
- c. Memberdayakan potensi umat
- d. Meningkatkan pendapatan anggota
- e. Meningkatkan ketakwaan, kompetensi dan kesejahteraan karyawan.

B. Nilai dasar, Tujuan serta Budaya Perusahaan KSPPS Hudatama

1. Nilai Dasar

Bekerja dan melayani adalah sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana dakwah, sarana peneguhan fungsi khalifah dan sarana pencarian *ma'isyah*/penghidupan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syariah.

3. Budaya Perusahaan

- a. Hidayah (petunjuk); kami berkomitmen untuk melayani, membimbing, menerapkan prinsip-prinsip syariah
- b. Ulfah (dekat); kami berkomitmen membangun kedekatan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam memberikan pelayanan
- c. Da'wah (membimbing); kami berkomitmen dakwah menjadi motivasi kami dalam bekerja dan melayani
- d. Amanah (dapat dipercaya); kami berkomitmen mengelola dengan jujur, amanah, transparan, akuntabel

- e. Ta'awun (saling menolong); kami berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, membangun sinergi dan kemitraan yang saling menguntungkan
- f. Aqwa (sangat kuat); kami berkomitmen kuat dalam cita-cita, berintegritas, kreatif, dinamis, inovatif dan mengembangkan diri untuk menghadapi tantangan perubahan jaman
- g. Muhtaraf (profesional); kami berkomitmen melakukan pekerjaan secara professional dan mencintai profesi
- h. Aflah (sukses); kami berkomitmen meraih kesuksesan bersama, menggapai kebahagiaan, keberkahan dan menjadi kebanggaan ummat

C. Legalitas Perusahaan, Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi KSPPS Hudatama

1. Legalitas Perusahaan

Berdiri	:	2 Oktober 1998
Kelembagaan	:	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Pengesahan Akta Pendirian	:	0233/BH/KWK.11-30/III/1999 tanggal 25 Maret 1999
Pengesahan Perubahan	:	018/PAD/XIV/I/2016 tanggal 27 Januari 2016
ID Koperasi	:	3374040049
NPWP	:	1.997.283.5-517.000

2. Wilayah Kerja KSPPS Hudatama

a. Kantor Pusat

Jl. Tumpang Raya No. 93, Semarang

Telepon : 024-76423799

Email : bmthdtm@yahoo.co.id

- b. Kantor Cabang Utama (KCU)
Jl. Tumpang Raya No. 93, Semarang
Telepon : 024-76420813
- c. Kantor Cabang Mangkang
Ruko Grand Mangkang Blok D, Jl. Raya Semarang-Jakarta
Telepon : 024-84310089
- d. Kantor Cabang Tembalang
Ruko Grand Sambiroto Kav. 3, Jl. Sambiroto Raya, Tembalang,
Semarang
Telepon : 024-76746640
- e. Kantor Cabang Semarang Barat
Jl. Abdulrahman Saleh No. 226D (depan rumah dinas Walikota
Semarang)
Telepon : 024-76430750
- f. Kantor Cabang Gunungpati
Jl. Raya Banaran, Sekaran, Gunungpati, Semarang
Telepon : 024-86455467
- g. Baitul Maal
Jl. Tumpang Raya No. 93, Semarang
Telepon ; 024-76423799

3. Struktur Organisasi

Ketua	:	Drs. H. Mahno Rahardjo, M.Si
Anggota	:	Drs. H. Soeroto HS, M.Si
		Ir. H. Suharto MS

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Dr. Drs. H. Haerudin, M.T
2. H. Samsudin Salim, S. Ag, M.Ag

PENGURUS

Ketua : Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si

Wakil Ketua : Ir. Hj. Lies Herawati

Sekretaris : H. Nursodik, S.Pd, M.Si

Bendahara : Dra. Hj. Suhermini, M.Si

Wakil Bendahara : Dr. Drs. H.M. Harlanu, M.Pd

PENGELOLA

Direktur Utama : Khoiridin, S.Pd, M.Si

Manager Operasional : Bancol, S.E

Manager Pemasaran : Robi Aryanto, S.E

Kabiro Pengendalian
Internal & Teknologi
Informasi : Bubun Hoerudin, S.E, M.M

Kabiro Funding : H. Nur Malik Saefudin, S.Ag

Kepala Bidang Maal : Indah Kusumastuti, A.Md Kom

Kepala Bidang
Remidial (Pj.) : Dayanaji Gati P., S.E

Kepala Bidang : Tri Wiyanto, S.Sos

Financing Porsi Haji
(Pj.)

Kepala Bidang SDM	:	Amelia Nuralata, S.T, M.M
-------------------	---	---------------------------

Kepala Cabang Utama Sampangan	:	Kristian Aji Saputro, A.Md
----------------------------------	---	----------------------------

Kepala Cabang Mangkang	:	Hani'am Mari'a, S.E
---------------------------	---	---------------------

Kepala Cabang Tembalang (Pj.)	:	Asnal Muntolib, S.E.I
----------------------------------	---	-----------------------

Kepala Cabang Semarang Barat (Pj.)	:	Akhmad Mudzakir, S.E
---------------------------------------	---	----------------------

Kepala Cabang Gunungpati	:	Edy Mulyono, S.Pd
-----------------------------	---	-------------------

D. Produk-produk KSPPS Hudatama

KSPPS Hudatama adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan berupa penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Sebelum melakukan atau memanfaatkan produk simpanan pada KSPPS Hudatama, diwajibkan terlebih dahulu menjadi anggota di KSPPS Hudatama dengan cara:

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- Membayar setoran sesuai ketentuan.

1. Penghimpunan Dana (*funding*)

Adapun produk penghimpun dana yang ada pada KSPPS Hudatama yaitu:

a) Simpanan Pokok

Adalah simpanan yang wajib dibayarkan saat akan menjadi anggota di KSPPS Hudatama. Simpanan pokok ini hanya dibayar sekali selama

menjadi anggota sebesar Rp. 50.000,- dan dapat diambil kembali jika ingin berhenti menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib

Adalah simpanan yang wajib dibayarkan sekali setiap bulan sebesar Rp. 10.000,- dan dapat diambil kembali jika ingin berhenti menjadi anggota.

c) Simpanan Khusus

Adalah simpanan selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan jenis ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan anggota. Adapun produk simpanan khusus ini yaitu:

1) Simpanan Usaha Banyak Manfaat (SAHABAT)

Adalah simpanan sukarela anggota dengan akad *wadi'ah yad dlomanah* yang bisa diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Anggota akan mendapatkan buku simpanan. Saldo minimum Rp. 10.000,- dan administrasi penutupan rekening Rp. 2.000,- dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000,-.

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bagi hasil kompetitif
- c. Setoran awal dan saldo minimum hanya Rp. 10.000,-
- d. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- e. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui *Teller* Kantor Cabang KSPPS Hudatama.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Adalah simpanan yang dirancang untuk investasi jangka panjang atau biasa dikenal sebagai deposito. Jangka waktu minimal adalah 3 bulan dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan akan mendapatkan bukti warkat serta souvenir selama persediaan masih ada. Akah yang digunakan pada produk ini adalah akad *mudharabah*.

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Mendapat bagi hasil
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- c. Bagi hasil dapat di transfer ke rekening simpanan atau menambah pokok simpanan
- d. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) atau tidak otomatis
- e. Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 3, 6 atau 12 bulan.

3) Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Adalah simpanan dengan akad *wadi'ah yad dlomanah* yang dipersiapkan untuk ibadah Qurban, dan hanya bisa ditarik saat bulan *Dzulhijjah*.

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bagi hasil kompetitif
- c. Setoran awal dan saldo minimum hanya Rp. 10.000,-
- d. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- e. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui *Teller Kantor Cabang KSPPS Hudatama* dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat bulan *Dzulhijjah*.

4) Simpanan Rencana (SIRENCANA)

Adalah simpanan dengan akad *wadi'ah yad dlomanah* yang dipersiapkan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan anggota. Pengambilan simpanan SIRENCANA dilakukan dengan memberitahukan sebelumnya kepada pengelola KSPPS Hudatama. Dapat digunakan untuk perencanaan pendidikan, wisata, pensiun dan lain sebagainya.

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Bebas biaya administrasi bulanan

- b. Bagi hasil kompetitif
- c. Setoran awal dan saldo minimum hanya Rp. 10.000,-
- d. Setiap anggota penyalir akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- e. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui *Teller* Kantor Cabang KSPPS Hudatama.

5) Simpanan Perjalanan Rohani (SIMPONI)

Simpanan dengan akad *wadi'ah yad dlomanah* untuk rencana perjalanan kerohanian (Ziarah) maupun wisata. Pelaksanaan tahun 2019 akan diadakan wisata menuju Jawa Timur dengan destinasi wisata:

- Wisata Bahari Lamongan
- Wisata Masjid Perut Bumi
- Pantai Tuban (menyesuaikan)
- Pusat Oleh-oleh

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Simpanan sebesar Rp. 30.000,- setiap bulan
- b. Bus executive, makan 2x, snack, kaos
- c. Tiket masuk tempat wisata
- d. *Doorprize*
- e. Berangkat 3 November 2019
- f. Setiap anggota penyalir akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- g. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui *Teller* Kantor Cabang KSPPS Hudatama.

6) Simpanan Haji dan Umroh (SIHAJROH)

Adalah simpanan dengan akad *wadi'ah yad dlomanah* yang dipersiapkan untuk Ibadah Haji atau Umroh.

Fasilitas dan keuntungan:

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bagi hasil kompetitif

- c. Setoran awal dan saldo minimum hanya Rp. 10.000,-
- d. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- e. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui *Teller* Kantor Cabang KSPPS Hudatama dan penarikan hanya dapat dilakukan untuk Pembayaran Haji atau Umroh.

Tabel Simulasi Simpanan SIHAJROH

(Asumsi biaya pendaftaran Haji dan Umroh Rp. 25.000.000,-)

Setoran	Jangka Waktu
Rp. 210.000	120 bulan / 10 tahun
Rp. 235.000	108 bulan / 9 tahun
Rp. 265.000	96 bulan / 8 tahun
Rp. 300.000	84 bulan / 7 tahun
Rp. 350.000	72 bulan / 6 tahun
Rp. 420.000	60 bulan / 5 tahun
Rp. 525.000	48 bulan / 4 tahun
Rp. 700.000	36 bulan / 3 tahun
Rp. 1.050.000	24 bulan / 2 tahun
Rp. 2.100.000	12 bulan / 1 tahun

2. Penyaluran Dana (*lending*)

Sebelum memanfaatkan atau menggunakan produk pembiayaan dari KSPPS Hudatama, maka syarat utama yang harus dilakukan adalah menjadi anggota KSPPS Hudatama. Setelah itu dapat melengkapi dengan syarat lain yaitu:

- a. Mengisi Formulir Pembiayaan

- b. Fotokopi KTP Suami Istri
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotokopi Jaminan (BPKB dan STNK/ SHM dan PBB)
- e. Fotokopi Surat Nikah
- f. Slip Gaji
- g. Bukti Cek Fisik No. Rangka dan No. Mesin

Dalam menyalurkan dananya, KSPPS Hudatama menggunakan beberapa akad yaitu:

- a. *Mudharabah*
Pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dimana KSPPS Hudatama sebagai pemodal dan anggota sebagai pihak yang memutar modal dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan antara 35:65.
- b. *Murabahah*
Pembiayaan untuk keperluan konsumtif anggota dengan perlakuan margin keuntungan yang disepakati.
- c. *Musyarakah*
Pembiayaan kerjasama untuk usaha produktif dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50.
- d. *Ijarah*
Ijarah adalah akad pemindah hak guna manfaat atas objek ijarah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, serta tidak ada pemindahan kepemilikan setelah akad berakhir.
- e. *Rahn*
Merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa barang berharga seperti emas batangan atau logam mulia, kendaraan atau barang berharga lainnya sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

ILUSTRASI ANGSURAN KSPPS HUDATAMA

Harga Beli	Harga Jual				
	Jangka Waktu				
(Rp.)	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Rp 1.000.000	Rp 184.666,67	Rp 101.333,33			
Rp 1.500.000	Rp 277.000,00	Rp 152.000,00			
Rp 2.000.000	Rp 369.333,33	Rp 202.666,67	Rp 147.111,11	Rp 119.333,33	Rp 91.555,56
Rp 2.500.000	Rp 461.666,67	Rp 253.333,33	Rp 183.888,89	Rp 149.166,67	Rp 114.444,44
Rp 3.000.000	Rp 554.000,00	Rp 304.000,00	Rp 220.666,67	Rp 179.000,00	Rp 137.333,33
Rp 3.500.000	Rp 646.333,33	Rp 354.666,67	Rp 257.444,44	Rp 208.833,33	Rp 168.222,22
Rp 4.000.000	Rp 738.666,67	Rp 405.333,33	Rp 294.222,22	Rp 238.666,67	Rp 183.111,11
Rp 4.500.000	Rp 831.000,00	Rp 456.000,00	Rp 331.000,00	Rp 268.500,00	Rp 206.000,00
Rp 5.000.000	Rp 923.333,33	Rp 506.666,67	Rp 367.777,78	Rp 298.333,33	Rp 228.888,89
Rp 5.500.000	Rp 1.015.666,67	Rp 557.333,33	Rp 404.555,56	Rp 328.166,67	Rp 251.777,78
Rp 6.000.000	Rp 1.108.000,00	Rp 608.000,00	Rp 441.333,33	Rp 358.000,00	Rp 274.666,67
Rp 6.500.000	Rp 1.200.333,33	Rp 658.666,67	Rp 478.111,11	Rp 387.333,33	Rp 297.555,56
Rp 7.000.000	Rp 1.292.666,67	Rp 709.333,33	Rp 514.888,89	Rp 417.666,67	Rp 320.444,44
Rp 7.500.000	Rp 1.385.000,00	Rp 760.000,00	Rp 551.666,67	Rp 447.500,00	Rp 343.333,33
Rp 8.000.000	Rp 1.477.333,33	Rp 810.666,67	Rp 588.444,44	Rp 477.333,33	Rp 366.222,22
Rp 8.500.000	Rp 1.569.666,67	Rp 861.333,33	Rp 625.222,22	Rp 507.166,67	Rp 389.111,11
Rp 9.000.000	Rp 1.662.000,00	Rp 912.000,00	Rp 662.000,00	Rp 537.000,00	Rp 412.000,00
Rp 9.500.000	Rp 1.754.333,33	Rp 962.666,67	Rp 698.777,78	Rp 566.833,33	Rp 434.888,89
Rp 10.000.000	Rp 1.846.666,67	Rp 1.013.333,33	Rp 735.555,56	Rp 596.666,67	Rp 457.777,78
Rp 15.000.000	Rp 2.770.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 1.103.333,33	Rp 895.000,00	Rp 686.666,67
Rp 20.000.000	Rp 3.693.333,33	Rp 2.026.666,67	Rp 1.471.111,11	Rp1.193.333,33	Rp 915.555,56
Rp 25.000.000	Rp 4.616.666,67	Rp 2.533.333,33	Rp 1.838.888,89	Rp1.491.666,67	Rp 1.144.444,44
Rp 30.000.000	Rp 5.540.000,00	Rp 3.040.000,00	Rp 2.206.666,67	Rp1.790.000,00	Rp 1.373.333,33
Rp 35.000.000	Rp 6.463.333,33	Rp 3.546.666,67	Rp 2.574.444,44	Rp2.088.333,33	Rp 1.602.222,22
Rp 40.000.000	Rp 7.386.666,67	Rp 4.053.333,33	Rp 2.942.222,22	Rp2.306.666,67	Rp 1.831.111,11
Rp 45.000.000	Rp 8.310.000,00	Rp 4.560.000,00	Rp 3.310.000,00	Rp2.685.000,00	Rp 2.060.000,00
Rp 50.000.000	Rp 9.233.333,33	Rp 5.066.666,67	Rp 3.677.777,78	Rp2.983.333,33	Rp 2.288.888,89
Rp 100.000.000	Rp 18.466.666,67	Rp 10.133.333,33	Rp 7.355.555,56	Rp5.966.666,67	Rp 4.577.777,78

E. Layanan KSPPS Hudatama

Sesuai dengan salah satu peran koperasi syariah yaitu sebagai lembaga sosial, maka KSPPS Hudatama tidak hanya memiliki produk yang bertujuan untuk mencari keuntungan/profit saja, namun KSPPS Hudatama juga

memberikan layanan kepada masyarakat tanpa ada tujuan profit. Adapun layanan-layanan tersebut adalah:

1. Bina Ekonomi Umat (BIKUM)

Bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi dengan cara memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang nantinya mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional.

2. Bina Pendidikan Umat (BIPUM)

Beasiswa membangun 1.000 generasi Qur'ani di Kota Semarang, pelatihan produktif dan seminar pendidikan. Donasi beasiswa SD sebesar Rp. 30.000,- dan SMP sebesar Rp. 60.000,-.

3. Bina Kesehatan dan Sosial (BIKKES)

Pelayanan kesehatan dan sosial untuk masyarakat *dhuafa* berupa mobil *ambulance*, cek tensi dan gula darah, siaga bencana dan pembagian sembako untuk wilayah Semarang.

4. Bina Kemakmuran Masjid (BIKMAS)

Program santunan bagi marbot atau penjaga masjid dan mushola wilayah Semarang yang merupakan kategori *dhuafa*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan di KSPPS Hudatama³⁹

1. Rukun dan Syarat Ijarah di KSPPS Hudatama

a. *Sighat* atau Ijab Qabul

Adalah kesepakatan yang dibuat dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yaitu KSPPS Hudatama sebagai pemberi sewa dan anggota sebagai penyewa. Dalam perjanjian tersebut ada beberapa hal yang dijelaskan pihak pemberi sewa untuk nantinya disepakati oleh kedua belah dalam naskah akad. Naskah akad tersebut adalah sebagai berikut:

AKAD IJARAH MULTIJASA

Nomor: **xxx/02.05/HUDATAMA/V/2019**

Bismillahirrahmanirrahiim

“Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...”

(Qs. Al-Nisa' (4): 29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani

Pada hari ini : xxxx Tanggal : xxxx

Tempat : Kantor KSPPS Hudatama oleh para pihak berikut:

1. KHOIRIDIN, S.Pd, M.Si, Direktur Utama KSPPS Hudatama, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama

³⁹ Profile Company dari KSPPS Hudatama

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hudatama yang berkedudukan dan berkantor di Semarang untuk selanjutnya disebut Pihak I.

2. Nama : xxxx
Alamat : xxxx
TTL : xxxx
No. Identitas : xxxx

Yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari:

Nama : xxxx
Alamat : xxxx
TTL : xxxx

Bertindak untuk dan atas nama pribadi/ diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat mengadakan PERJANJIAN SEWA MENYEWA (IJARAH) MULTIJASA yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I

SEWA MENYEWA

Pihak I menyewakan barang/jasa/manfaat kepada Pihak II berupa barang/jasa/manfaat dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ma'jur (obyek sewa) | : BIAYA SEKOLAH (Misal) |
| 2. Pokok harga ma'jur | : Rp 2.000.000,00 |
| Uang muka (urbun) | : Rp - |
| Pembiayaan | : Rp 2.000.000,00 |
| 3. Ujrah | : Rp 432.000,00 |
| 4. Harga sewa | : Rp 2.432.000,00 |
| 5. Angsuran | : Rp 202.666,67 perbulan |

Pasal II
SISTEM, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEMBALI DAN
BIAYA-BIAYA

Pihak II sepakat untuk menyewa barang/jasa/manfaat sebagaimana tersebut pada Pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran adalah angsuran / jatuh tempo.
2. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalah **12** bulan. Oleh karena itu perjanjian SEWA MENYEWA ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada tanggal **xxx**.
4. Pihak II wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian SEWA MENYEWA ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
5. Semua pembayaran kembali/ pelunasan piutang Ijarah Multijasa berikut ujroh tersebut diatas, oleh Pihak II kepada Pihak I akan dilakukan melalui rekening Pihak II yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II di Pihak I, dan dengan Pihak II memberi kuasa pada Pihak I untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran berikut margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya.
6. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari libur bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
7. Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang dijanjikan Pihak II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti rugi, termasuk juga biaya kuasa

dari Pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh Pihak II.

Pasal III

BIAYA-BIAYA

Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad Ijarah Multijasa ini, meliputi:

1. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
2. Biaya Notaris : Rp -
3. Biaya Asuransi : Rp 5.000,00
4. Biaya Materai : Rp 13.000,00

Yang semua biaya tersebut dibayar di muka.

Pasal IV

PERNYATAAN JAMINAN

Untuk menjamin kemandirian dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian SEWA MENYEWA ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa:

a. No Agunan : xxxx

Nama Agunan : **SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN**

No. Dokumen : **xxx**

Atas Nama : xxx

b. No Agunan : xxx

Nama Agunan : xxx

No. Dokumen : xxx

Atas Nama : xxx

Sebagai jaminan atas akad SEWA MENYEWA yang telah disepakati.

2. Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedangkan obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak I.
6. Pihak II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal IV ayat I pada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal II perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan untuk melunasi kewajiban Pihak II. Tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun.

Pasal V

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian kemudian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji:

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh keadaan memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal VI

ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan

atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VII

DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang di Semarang.

Pasal VIII

PASAL TAMBAHAN

Perjanjian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, sera disaksikan oleh saksi-saksi.

Semarang, xx Juni 2019

Pihak I

Pihak II

KHOIRIDIN, S.Pd, M.Si

XXXX

IKUT BERTANGGUNGJAWAB

XXXX

Saksi-saksi:

Kepala Cabang

Administrasi

Marketing

KRISTIAN AJI S, A.MD

SYAVIRA RR

KRISTIAN A

b. Pihak-pihak yang berakad

Pihak pertama yaitu KSPPS Hudatama sebagai pemberi sewa dengan kewajiban untuk:

- 1) Menyediakan dan memberikan obyek sewa baik berupa barang maupun jasa
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa
- 3) Menjamin apabila terdapat cacat pada obyek sewa

Dan pihak kedua yaitu anggota sebagai penyewa dengan kewajiban:

- 1) Membayar sewa dan bertanggungjawab terhadap obyek sewa
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan
- 3) Memberikan jaminan. Meskipun dalam islam tidak mewajibkan adanya jaminan, namun untuk kehati-hatian dan bentuk kesungguhan anggota dalam melunasi kewajibannya, KSPPS Hudatama mengharuskan adanya jaminan di setiap pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

c. Obyek Ijarah

Dapat berupa manfaat aset dengan pembayaran sewa maupun dapat berupa manfaat jasa dengan pembayaran berupa upah. Jenis pembiayaan yang digunakan di KSPPS Hudatama adalah untuk:

- 1) Biaya Pendidikan
- 2) Biaya Kesehatan
- 3) Biaya Pernikahan
- 4) Biaya Perjalanan

2. Kewajiban yang Muncul setelah Terjadinya Akad Ijarah Multijasa

a. Ujroh (*fee*)

Ujroh yang ditetapkan oleh KSPPS Hudatama berbeda sesuai dengan jangka waktu akadnya, yaitu:

- 1) Jangka waktu 6 bulan : 10,8% dari plafon pembiayaan
- 2) Jangka waktu 12 bulan : 21,6% dari plafon pembiayaan

- 3) Jangka waktu 18 bulan : 32,4% dari plafon pembiayaan
- 4) Jangka waktu 24 bulan : 43,2% dari plafon pembiayaan
- 5) Jangka waktu 36 bulan : 64,8% dari plafon pembiayaan

b. Biaya-biaya

Biaya tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan langsung oleh anggota baik dengan cara mengurangi jumlah pembiayaan dengan biaya-biaya tersebut atau dengan uang pribadi anggota. Biaya tersebut antara lain:

- 1) Biaya Administrasi adalah sebesar 2,5% dari plafon pembiayaan
- 2) Biaya Materai adalah Rp 6.500,00 per materai, materai digunakan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan dalam akad. Biasanya biaya materai di KSPPS Hudatama adalah sebesar Rp 13.000,00.
- 3) Biaya Asuransi dikenakan sesuai dengan umur anggota yang melakukan pembiayaan.

Apabila anggota berumur kurang dari 39 tahun, maka biaya asuransinya adalah sebesar 0,25% dari plafon

Apabila anggota berumur lebih dari 39 tahun, maka biaya asuransinya adalah sebesar 0,3% dari plafon

- 4) Biaya Notaris hanya digunakan untuk pembiayaan yang lebih dari Rp 10.000.000,00

c. Sistem Pembayaran Angsuran

Fasilitas yang diberikan oleh KSPPS Hudatama kepada anggotanya untuk memudahkan dalam membayar angsuran antara lain:

- 1) Membayar secara langsung di kanto KSPPS Hudatama
- 2) Menabung di rekening simpanan Sahabat agar nantinya saat jatuh tempo pembayaran saldo langsung didebetkan di rekening KSPPS Hudatama

B. Penerapan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama⁴⁰

Dalam PSAK 107, akuntansi ijarah bagi pemberi sewa terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan.

1) Biaya Perolehan

Menurut PSAK 107, obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Obyek ijarah dapat berupa aset tetap maupun aset tidak berwujud. Adapun aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemungkinan besar perusahaan (lembaga keuangan syariah) akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan dapat diukur.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Aset Ijarah	xxx	
Kas		Xxx

Namun karena pada ijarah multijasa tidak ada aset yang disewakan, maka pencatatan yang dilakukan KSPPS Hudatama adalah sebagai berikut:

Piutang Ijarah Multijasa	xxx	
Kas		Xxx

setelah terjadinya akad, maka dana tersebut akan didebetkan di rekening anggota. Apabila anggota melakukan pencairan, ada dua transaksi yang dicatat oleh KSPPS Hudatama sebagai pemberi sewa yaitu:

- a. Piutang yang diberikan kepada anggota

Piutang Ijarah Multijasa	xxx	
Simpanan Anggota		Xxx

- b. Margin (yang sudah disepakati ketika akad)

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Robi Aryanto, S.E selaku Manager Pemasaran KSPPS Hudatama pada tanggal 17 Juni 2019

Margin yang ditangguhkan	xxx	
Simpanan Anggota		Xxx

Karena dalam ijarah multijasa memang tidak ada aset yang perlu diperoleh terlebih dahulu oleh KSPPS Hudatama, maka pencatatan menggunakan piutang ijarah multijasa. Dimana KSPPS Hudatama selaku pemberi sewa mengeluarkan dananya untuk memberikan pembiayaan kepada anggota (piutang ijarah multijasa) maka ada pengeluaran dari sisi kas. Maka penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama pada poin biaya perolehan sudah sesuai.

2) Penyusutan

Menurut PSAK 107, pada akhir tahun saat pemilik (lembaga keuangan syariah) akan menyusun laporan keuangan maka aset ijarah tersebut harus disusutkan sesuai dengan ketentuan, yaitu:

- Jika berupa aset yang dapat disusutkan
- Kebijakan penyusutan harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Biaya Penyusutan	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

Pada akad ijarah multijasa yang diterapkan di KSPPS Hudatama, tidak ada aset yang disewakan. Oleh karena itu tidak ada pencatatan akuntansi yang dilakukan pada poin penyusutan ini.

3) Pengakuan Pendapatan

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atau aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas	xxx	
-----	-----	--

Pendapatan Ijarah		xxx
-------------------	--	-----

Atau dapat juga dicatat sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pendapatan Ijarah (pokok)		xxx
Pendapatan Ijarah (margin)		xxx

Namun apabila pada akhir periode pelaporan (31 Desember) pihak pemberi sewa akan mengakui pendapan ijarah yang belum diterima (pada bulan Desember) karena baru akan dibayarkan di bulan berikutnya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Piutang Pendapatan Ijarah	xxx	
Pendapatan Ijarah		xxx

Pada bulan selanjutnya sebelum penyewa membayar, dibuat jurnal penyesuaian:

Pendapatan Ijarah	xxx	
Piutang Pendapatan Ijarah		xxx

Pada penerapannya di KSPPS Hudatama, pencatatan pendapatan sewa dicatat sebagai berikut:

- a. Apabila anggota membayar secara langsung

Kas	xxx	
Pendapatan Ijarah (pokok)		xxx

Kas	xxx	
Pendapatan Ijarah (margin)		xxx

- b. Apabila anggota membayar melalui rekening tabungannya

Pembayaran sewa melalui cara ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh anggota yang menabung untuk nanti pada saat jatuh tempo pembayaran akan langsung didebetkan ke rekening KSPPS Hudatama. Pencatatannya adalah sebagai berikut:

Kas	xxx	
Pendapatan Ijarah (Simpanan Anggota)		xxx

Dengan demikian penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 pada poin pengakuan pendapatan sudah sesuai.

4) Beban atau Biaya Perbaikan

Biaya perbaikan aset ijarah merupakan tanggungan pemilik, perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemberi sewa.

Pengakuan biaya perbaikan aset ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan tidak rutin aset ijarah diakui pada saat terjadinya
- b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemberi sewa, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemberi sewa dan diakui sebagai beban saat terjadinya.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan selama akad berlangsung (rutin)

Biaya Akad yang ditangguhkan	Xxx	
Kas		xxx

2. Biaya saat terjadinya perbaikan (rutin)

Beban Akad Ijarah	Xxx	
Biaya Akad yang ditangguhkan		xxx

3. Apabila penyewa melakukan perbaikan

Beban perbaikan	Xxx	
Kas		xxx

Dalam penerapannya di KSPPS Hudatama, tidak ada beban atau biaya perbaikan karena memang tidak ada aset yang disewakan. Namun ada beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh anggota saat akad terjadi. Biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Biaya Administrasi, jurnalnya:

Kas (pendapatan adm.)	Xxx	
Simpanan Anggota		xxx

2. Biaya Materai

Kas (pendapatan materai)	Xxx	
Simpanan Anggota		xxx

3. Biaya Asuransi

Titipan Asuransi	Xxx	
Simpanan Anggota		xxx

4. Biaya Notaris

Titipan Notaris	Xxx	
Simpanan Anggota		xxx

Pada biaya asuransi dan biaya notaris, pada pencatatan di KSPPS Hudatama tidak diakui sebagai pendapatan karena biaya tersebut nantinya akan dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu pihak asuransi dan notaris. Jadi peran KSPPS Hudatama disini hanyalah sebagai perantara.

5) Perpindahan Kepemilikan

Perpindahan kepemilikan aset ijarah dari pemberi sewa kepada penyewa terjadi pada akad *ijarah muntahiya bit tamlik* dengan cara:

- Hibah, maka jumlah tercatat aset ijarah diakui sebagai beban.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Beban Ijarah	Xxx	
Aset Ijarah		Xxx

- Penjualan, penjualan yang terjadi setelah masa akad maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Apabila penjualan diatas nilai sisa

Kas	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Keuntungan Penjualan		xxx
Aset Ijarah		xxx

Apabila penjualan dibawah nilai sisa

Kas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Kerugian Penjualan		xxx
Aset Ijarah		xxx

Penerapannya di KSPPS Hudatama adalah tidak ada produk *ijarah muntahiya bit tamlik*, namun apabila anggota melakukan pelunasan dini yaitu pelunasan yang dilakukan sebelum masa akad ijarah multijasa berakhir, maka sisa dari margin yang belum dibayarkan dihibahkan oleh pihak KSPPS Hudatama kepada anggota.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Beban Pelepasan	xxx	
Piutang Ijarah (margin)		xxx

Maka penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama pada poin perpindahan kepemilikan sudah sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad ijarah yang dilakukan KSPPS Hudatamasama seperti penerapan ijarah pada umumnya, seperti rukun ijarah yaitu *sighat* atau ijab qabul, pihak-pihak yang berakad (KSPPS Hudatama dan anggota), serta obyek ijarah. Adapun kewajiban lain yang muncul setelah akad antara lain:
 - a. Ujroh yang harus dibayarkan
 - b. Biaya-biaya yang harus dibayarkan
 - c. Dan pembayaran angsuran

2. Penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama belum terlaksana sepenuhnya. Karena dari lima poin pembahasan yaitu biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan serta perpindahan kepemilikan hanya ada tiga poin yang dapat diterapkan yaitu biaya perolehan, pengakuan pendapatan dan perpindahan kepemilikan. Namun pada poin pengakuan pendapatan terdapat perbedaan yaitu dalam PSAK 107, pembayaran angsuran dicatat menjadi satu transaksi, namun pada penerapannya di KSPPS Hudatama dicatat menjadi dua transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama dapat diterapkan sebesar 60%, sedangkan 40% lainnya belum diterapkan karena tidak sesuai dengan pembiayaan ijarah multijasa yang tanpa aset berwujud.

B. Saran

1. Perlu adanya kesamaan pencatatan keuangan di KSPPS Hudatama antara cabang satu dengan cabang yang lain
2. Berkaitan dengan pencatatan akuntansi ijarah multijasa pada poin pengakuan pendapatan, sebaiknya pencatatan saat pembayaran angsuran dicatat menjadi satu transaksi agar lebih efisien.
3. Perlu adanya kotak saran agar anggota dapat menilai dan memberi kritikan terhadap kinerja karyawan KSPPS Hudatama demi kebaikan dan kemajuan KSPPS Hudatama sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Yaya, Rizal, dkk., 2016, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat
- Muttaqien, Dadan, 2008, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Solihah, Ajeng Mar'atus, 2014, "Penerapan Akad Ijaah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Halaman 109-110
- Mariyanti, Oktviani dan Anisah, Nur, "Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol 10 No. 2, Halaman 168
- Vhintara, Cut dan Rahmawaty, "Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2 No. 4, Halaman 159-160
- Muchlasin, Farid, "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)", *Skripsi dipublikasikan* pada eprints.iain-surakarta.ac.id/1621
- Gunawan, Dian, "Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar", *Skripsi dipublikasikan* pada repository.unhas.ac.id/6257
- Pulungan, Akhir Saleh, "Analisis Perlakuan Pembiayaan Ijarah dalam Rahn berdasarkan PSAK No. 107 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan)", *Skripsi dipublikasikan* pada etheses.uin-malang.ac.id/5964

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Emzir, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo

Tambunan, Toman Sony dan Tambunan, Luna Theresia, 2017, *Koperasi*, Yogyakarta: expert

Hidayat, Farid, 2016, “Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1, Halaman 384-385

Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan, 2013, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2012, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Muhammad, 2008, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press

Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

MUI, Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Penerbit Erlangga

www.bmthudatama.com

LAMPIRAN

1. Slip Setoran dan Penarikan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ALHUDA TATA UTAMA		Tanggal :	No. : 257536
Setoran Tunai :	<input type="checkbox"/> Sahabat <input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> Si Rencana <input type="checkbox"/> Si Hajroh	<input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> SP / SW
			Validasi teller
Atas Nama :			
No. Rekening :			
Jumlah Setoran	Jumlah dalam huruf		
Rp.			
Keterangan :			
Pengesahan BMT		Nama & tanda tangan anggota	

*mohon diisi dengan lengkap & benar

APLIKASI SETORAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ALHUDA TATA UTAMA		Tanggal :	No. : 083825
Penarikan dari :	<input type="checkbox"/> Sahabat <input type="checkbox"/> Si Suqur	<input type="checkbox"/> Si Rencana <input type="checkbox"/> Si Hajroh	<input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> SP / SW
			Validasi teller
Atas Nama :			
No. Rekening :			
Jumlah Penarikan	Jumlah dalam huruf		
Rp.			
Keterangan :			
Pengesahan BMT		Nama & tanda tangan anggota	

*mohon diisi dengan lengkap & benar

APLIKASI PENARIKAN

2. Brosur KSPPS Hudatama

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

KSPPS HUDATAMA

Wujudkan Niat Suci ke Baitullah...

cuma

5 Juta

SUDAH BISA MENDAFTAR HAJI

Tanpa Jaminan + Mudah & Tidak Repot

Informasi Layanan HAJI

Kantor Pusat : Jl. Tumpang Raya No. 32 Telp/Fax (024) 8509250

Kantor Cabang Utama : Jl. Tumpang Raya No. 104 Semarang
Telp/Fax (024) 8504505 / 081 578 900 462

Kantor Cabang Mangkang : RUKO GRAND Mangkang Blok D
Jl. Raya Semarang - Jakarta
Telp. (024) 866 0329 / 085 100 993 018/ 081 578 900 463

Kantor Cabang Tembalang : RUKO GREEN Sambiroto Kav. 3, Jl. Sambiroto Raya
Telp. (024) 76746840 / 081 578 900 464

Kantor Cabang Sng Barat : Jl. Abdurrahman Saleh 226 D Semarang
(Depan RUMDIN Walikota)
Telp. (024) 76430750 / 081 578 900 465

Kantor Kas Sekaran : Jl. Banaran Raya Sekaran
Telp. (024) 86455467 / 081 578 900 466

KETENTUAN PEMBIAYAAN

1. Menjadi Anggota KSPPS BMT HUDATAMA
2. Mendaftarkan & membayar uang muka biaya haji sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Kekurangan dapat di biayakan
4. Ketentuan angsuran:

Jangka Waktu	Angsuran per bulan	Angsuran per hari (20 hari / bln)
12	1.966.700	98.500
24	1.133.400	56.700
36	855.600	42.800
48	716.700	35.900
60	633.400	31.700

SYARAT

1. Foto copy KTP = 10 lembar
2. Foto copy KK = 1 lembar
3. Foto copy Akte lahir / Ijazah / Surat Nikah = 1 lembar
4. Pas Foto Berwarna uk. 3 x 4 = 10 lbr, 4 x 6 = 2 lbr
dengan ketentuan TAMPAK WAJAH 80 %, BACKGROUND PUTIH,
TIDAK PAKAI PECI (LK), BERKERUDUNG SELAIN PUTIH (PR)

Fasilitas :

1. Pendampingan ke KEMENAG Sampai Dapat Porsi Haji.
2. Pengurusan Rekening Bank Syariah

3. Brosur KSPPS Hudatama

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

KSPPS HUDATAMA

Rahn (Gadai)

Butuh UANG TUNAI MENDESAK ???

Bawa Laptop atau HP Anda kesini !

Ijarah (Sewa Menyewa)

Mekah Semakin Dekat bersama KSPPS HUDATAMA

Saatnya kembali ke sekolah bersama **KSPPS HUDATAMA**

Mudharabah (Bagi Hasil)

Kami siap membantu Anda...!!

Murabahah (jual beli)

Melaju bersama KSPPS HUDATAMA

Investasi Alat Transportasi








PRODUK PEMBIAYAAN

KSPPS HUDATAMA memberikan pembiayaan dalam bentuk :

1. Pembiayaan Modal Usaha seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
2. Pembiayaan Investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya.
3. Pembiayaan Konsumtif seperti membangun / merenovasi rumah, melengkapi perabot rumah, dll

AKAD YANG DIGUNAKAN :

1. Mudharabah (Bagi Hasil)
2. Murabahah (Jual Beli)
3. Al-Ijarah (Sewa Menyewa)
4. Rahn (Gadai)

Persyaratan Umum :

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan di BMT
2. Fotocopy KTP Suami/ Istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Fotocopy Jaminan (BPKB/STNK & Sertifikat/PBB)
6. Fotocopy SK, Kartu Pegawai, Tespen (Bagi PNS)
7. Fotocopy Rekening Listrik
8. Bersedia disurvey

Kantor Pusat : Jl. Tumpang Raya No. 32 Telp/Fax : (024) 8509250

Kantor Cabang Utama : Jl. Tumpang Raya No. 104 Semarang Telp/Fax : (024) 8504505 / 081 578 900 462

Kantor Cabang Mangkang : RUKO GRAND Mangkang Blok D Jl. Raya Semarang - Jakarta Telp. (024) 8660329 / 085 100 993 018 / 081 578 900 463

Kantor Cabang Tembalang : RUKO GREEN Sambiroto Kav. 3, Jl. Sambiroto Raya Telp. (024) 76746640 / 081 578 900 464


Kantor Cabang Sng Barat : Jl. Abdurrahman Saleh 226 D Semarang (Depan RUMDIN Walikota) Telp. (024) 76430750 / 081 578 900 465

Kantor Kas Sekaran : Jl. Banaran Raya Sekaran Telp. (024) 86455487 / 081 578 900 466

INFO HUBUNGI :

Scanned with CamScanner

4. Permohonan Pembiayaan KSPPS Hudatama

	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ALHUDA TATA UTAMA	No. Seri : A 018751
Bismillahirrahmanirrahim		
PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
Kepada Yth. Pimpinan KSPPS HUDATAMA Di tempat		
Yang bertanda tangan di bawah ini : Hari / Tanggal : _____ Nama : _____ Alamat : _____ Pekerjaan : _____ Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan di KSPPS HUDATAMA : Tujuan Penggunaan : _____ Jumlah : _____ Jangka Waktu : _____ Jangka Akad : _____		
DATA PEMOHON		
Nama Lengkap : L / P Tempat / Tgl Lahir : Status : <input type="checkbox"/> Mnh <input type="checkbox"/> Bim <input type="checkbox"/> Duda / Janda Kartu Identitas : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Lainnya No. Tanggal Cetak : Berakhir : Alamat Sekarang : Telp. / HP Alamat Saat Darurat : Telp. / HP Status Rumah : Milik Sendiri / Milik Keluarga / Mertua / Kredit / Kontrak / Dinas Nama Ibu Kandung :		
II. DATA SUAMI / ISTRI		
Nama : Tempat / Tgl Lahir : Pekerjaan : Telp / Hp.		
III. DATA USAHA		
Nama Perusahaan : Bidang Usaha : Jabatan : Lama Bekerja : <input type="checkbox"/> THN <input type="checkbox"/> BLN Alamat Kantor : Telepon/Fax. :		
IV. REFERENSI		
1. Nama : Alamat : 2. Nama : Alamat :		

V. DATA JAMINAN

☐ Tanah ☐ Tanah dan Rumah ☐ Ruko

Nama Pemilik Jaminan :
Hubungan Keluarga :
Alamat Pemilik Jaminan :
Status Tanah : HGB / HM No.
Harga Taksiran :
Harga Pasar :
Alamat Jaminan :
☐ Motor ☐ Mobil

Merk Kendaraan :

Jenis : ☐ Sedan ☐ Mini Bus ☐ PU ☐ Lainnya
Tahun : Warna :
No. Polisi : No. Mesin :
Harga Taksiran : No. Rangka :
Harga Pasar : A/n BPKB :

VI. Data Finansial Dan Kekayaan

Penghasilan Bersih/bln. : Rp.
Penghasilan lain : Rp.
Penghasilan Suami/istri : Rp.
Pinjaman Lain :
Simpanan di Lembaga lain :

Kekayaan : ☐ Rumah Jumlah :
☐ Mobil/Motor Jumlah :
☐ Lainnya

Nilai Kekayaan :

VII. PERNYATAAN

1. Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dengan tujuan permohonan pembiayaan di KSPPS HUDATAMA
2. Kami memberikan kuasa kepada KSPPS HUDATAMA untuk memotong simpanan kami guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lain kepada KSPPS HUDATAMA jika terjadi keterlambatan pembayaran.
3. Kami menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan serta persyaratan yang ditentukan KSPPS HUDATAMA.
4. KSPPS HUDATAMA berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberikan alasannya.

Diterima Oleh
Petugas KSPPS HUDATAMA

Pemohon

Istri/Suami/Ortu/Anak

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuanita Adriyani
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 Februari 1997
NIM : 1605015055
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Alamat : Kedungwungu 012/002, Jatinegara, Tegal

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 01 Kedungwungu, lulus tahun 2009
2. MTs Al-Mujahadah, lulus tahun 2012
3. MA Al-Ikhlas, lulus tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Juni 2019

Zuanita Adriyani

1605015055